



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUCHLIS
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 436522

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 2.202.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/290 m2 di KAB / KOTA GOWA, WARISAN Rp. 540.000.000
2. Tanah Seluas 480 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000
3. Tanah Seluas 330 m2 di KAB / KOTA GOWA, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 125.000.000
4. Tanah Seluas 198 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
6. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000
7. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
8. Tanah Seluas 12000 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 560.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 500.000**

1. MOTOR, HONDA BEBEK / REVO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 171.150.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 1.957.561.693**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.331.211.693
III. HUTANG	Rp.	150.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.181.211.693

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.